

## **ABSTRACT**

DENIS YUSUF MERCURY (02659220022)

### **LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEES WHO ARE HARMFUL DUE TO THE WITHHOLDING OF DIPLOMACIES BY AUTHORITIES RELATING TO HUMAN RIGHTS**

(65 Pages)

Companies as job providers require workers to be retained by retaining the employee's original diploma as a guarantee so that the employee cannot violate the company's rules. Withholding of diplomas is a form of human rights violation that is often ignored by job providers. The purpose of writing this research is to determine the role of the government in handling cases of withholding of original diplomas carried out by employers and protecting the human rights of employees to get back original diplomas that are withheld. The need for legal protection for employees who experience diploma detention.

The research method used by the author in this thesis is to use normative research methods with library research which is research on statutory regulations (Statute Approach) and literature or reading materials as well as the opinions of experts and scholars (Conceptual Approach) related to the material discussed. . Based on research conducted in the research results, there are still many entrepreneurs who withhold diplomas. Even though employers and workers enter into employment agreements that do not include a clause withholding diplomas, original diplomas are still retained on the basis of mutual trust between employers and employees. The actions of employers are a violation of human rights, this results in employees not being able to apply for jobs in other places that are better suited to their abilities. There is a conclusion that there is a legal vacuum, there is no specific law that prohibits withholding diplomas.

**KEYWORDS:** Diploma, Human Rights, Legal Protection, Employment Agreement

Reference: 20 (1999-2020)

## ABSTRAK

DENIS YUSUF MERCURY (02659220022)

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENAHANAN IJAZAH OLEH PIHAK BERWENANG TERKAIT HAK ASASI MANUSIA**

(65 Halaman)

Perusahaan sebagai tempat penyedia lapangan pekerjaan, mensyaratkan menerima tenaga kerja adanya penahanan ijazah asli milik karyawan sebagai jaminan agar karyawan tidak bisa melanggar aturan di perusahaan. Penahanan ijazah yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang sering diabaikan oleh para penyedia lapangan pekerjaan. Tujuan menulis penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus penahanan ijazah asli yang dilakukan oleh pengusaha dan melindungi hak asasi karyawan untuk mendapatkan kembali ijazah asli yang ditahan. Perlunya perlindungan hukum bagi karyawan yang menagalami penahanan ijazah.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan literatur atau bahan bacaan serta pendapat para ahli dan sarjana (*Conceptual Approach*) yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hasil penelitian masih banyak pengusaha melakukan penahanan ijazah. Meskipun pengusaha dan tenaga kerja melakukan perjanjian kerja tidak mencantumkan klausul menahan ijazah, akan tetapi ijazah asli tetap di tahan atas dasar saling percaya antara pengusaha dan karyawan. Tindakan pengusaha sudah masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, hal ini mengakibatkan karyawan tidak bisa melamar pekerjaan di tempat lain yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya. Terdapat suatu kesimpulan bahwa adanya kekosongan hukum, tidak ada undang-undang khusus yang melarang penahanan ijazah.

**KATA KUNCI:** Ijazah, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja

Referensi: 20 (1999-2020)